

Politik Dinasti Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Dan Filsafat Hukum

Danni Arthana

Magister Ilmu Hukum Universitas Jember

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Email : arthanadanni@gmail.com

***Abstract.** Democracy idealizes the change of power not only to one group and certain groups. However, in practice, the clothes of democracy are only used in a purely procedural aspect. Matters that are substantive have not been seen perfectly. This can be illustrated in the power that does not shift from a certain point. The circle of power is concentrated in one particular circle. In this study, the political dynasty is dissected from two deep perspectives. Namely in the perspective of constitutional law and legal philosophy..*

***Keywords:** Dynastic politics, legal philosophy and constitutional law*

Abstrak. Demokrasi mengidealkan pergantian kekuasaan tidak hanya terpsat pada satu kelompok dan golongan tertentu. Akan tetapi, pada prakteknya, baju demokrasi hanya digunakan dalam aspek formil-prosedural semata. Hal-jal yang bersifat substantif belum terlihat secara sempurna. Hal tersebut dapat tergambar dalam kekuasaan yang tidak bergeser dari titik tertentu. Lingkaran kekuasaan tersebut terkonsentrasi pada satu ingkaran tertentu. Dalam penelitian ini, dinasti poltik tersebut dibedah dalam dua sudut pandang yang mendalam. Yakni dalam persepektif hukum tata negara dan filsafat hukum.

Kata kunci: Politik dinasti, Filsafat hukum dan Hukum tata negara

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraanya, hal ini bersumber dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Dan sudah menjadi suatu ketentuan dasar dimana setiap negara yang mentasbihkan dirinya sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya

¹ Lihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar

tidak akan pernah terlepas dari prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena prinsip dasar tersebut merupakan simbol dasar bahwa semua berorientasi pada kepentingan rakyat dalam suatu negara demokratis.

Salah satu contoh nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi adalah dengan adanya perhelatan pesta demokrasi rakyat yang kita kenal dengan adanya Pemilihan Umum, baik dalam bentuk pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, pemilihan umum legislatif yang memilih para wakil rakyat baik dalam tataran (Pusat) dan (Daerah), dan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi (Gubernur) dan ditingkat kabupaten kota (Bupati/Wali Kota). Hingga tataran terendah ditingkat pemilihan kepala desa yang juga melibatkan rakyat dan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masing-masing desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin setiap hak individu setiap warga negaranya baik dalam hal politik, sosial dan budaya. Dalam konteks kali ini dalam hak ikut serta dalam hal berpolitik yaitu hak yang sama untuk dapat memilih dan dipilih dalam perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Terkait dengan adanya isu Politik Dinasti yang selama ini menjadi pro-kontra dalam masyarakat terkait munculnya calon dari keluarga karena dianggap menciderai nilai-nilai demokrasi yang selama ini berlangsung di Indonesia karena disinyalir dapat mengambil keuntungan dari keluarga yang sudah berkuasa terlebih dahulu dalam peta politik Indonesia.

Akan tetapi pendapat tersebut di atas dibantah oleh Mahfud MD (ketua MK periode 2008-2013), Mahfud MD berpendapat bahwa tidak seharusnya ada larangan terhadap seseorang yang dirinya hendak maju dalam pesta demokrasi baik dalam konteks sebagai calon kepala daerah (Gubernur, Bupati Atau Wali Kota), sekalipun dirinya merupakan anggota keluarga dari salah satu penguasa negeri ini atau penguasa dalam suatu wilayah tertentu di negara ini dengan catatan bahwa yang bersangkutan punya kapasitas dan kapabilitas dalam pencolannya tersebut.² Karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang melindungi dan sudah mengatur demikian semua punya hak yang sama dalam hal berpolitik selama hak politiknya tidak dicabut dengan oleh pengadilan.

²<http://news.detik.com/berita/2964015/mahfud-md-dukung-putusan-mk-soal-dinasti-politik>. Di akses pada hari Selasa, 25 Maret 2021.pukul 09.02 WIB

Keberadaan politik dinasti dianggap sebagai sebuah kegagalan partai politik dalam menciptakan ruang-ruang kaderisasi. Politik dinasti dianggap memiliki konotasi negatif dalam pemerintahan karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diperkuat dengan data yang dilansir oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2010-2015 yang menyatakan bahwa ada 7 Politik Dinasti yang telah terindikasi melakukan korupsi, diantaranya Dinasti Ratu Atut Chosiyah; Dinasti Atty Suharti; Dinasti Sri Hartini; Dinasti Yan Anton Ferdian; Dinasti Syauckani Hasan Rais; Dinasti Fuad Amin; dan Dinasti Zulkifli Noerdin.³ Data ini menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung korup sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton, “*power tends to corrupt, absolut power, corrupt absolutely*”

Politik dinasti adalah mengandalkan kepemimpinan berada pada tangan segelintir orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan (famili). Politik dinasti ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui pengaruh politik pendahulunya dengan cara penunjukkan anak, istri, paman, dan semacamnya untuk menduduki pos-pos strategis dalam lembaga negara maupun partai politik. Sementara itu, politik dinasti merupakan dinasti–dinasti politik yang memainkan peran utama dalam permainan politik tingkat atas, sementara rakyat pemilih hanya bermain di pinggiran. Pada pengertian yang lain, politik dinasti adalah proses untuk mencapai kekuasaan tetap mengikuti mekanisme demokrasi melalui sistem partai yang secara internal mempunyai *rule of the game* sesuai partai bersangkutan. Akan tetapi, politik dinasti memiliki potensi besar menjadi nepotisme kekuasaan apabila mampu mencapai hegemoni.

Dari penjabaran di atas, di ketahui bahwa politik dinasti ini bisa tumbuh subur dan bernaungan pada dua lembaga, yakni, Pertama, Partai Politik berupa bentuk kepengurusan partai hanya dikelola oleh satu keluarga yang berpengaruh saja. Politik dinasti sudah pasti terjadi pada partai politik sebagaimana fakta-fakta realita yang ada, baik itu di tingkat Indonesia maupun negara lainnya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan tidak ditutup kemungkinan pada partai politik lainpun akan terjadi politik dinasti.

³ Redaksi Anti Korupsi, “*Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017*”, dalam *Rilis Media*, pada laman <https://antikorupsi.org> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, Pukul 22.15 WIB

Kedua, Lembaga – Lembaga Negara, berupa satu keluarga bisa membagi rata kekuasaan pada lembaga negara seperti satu dari dua anggota keluarga menguasai lembaga eksekutif dan yang satu lagi berada di lembaga legislatif. Selain itu politik dinasti pada lembaga negara bisa juga berkembang manakala suatu keluarga menduduki salah satu lembaga negara yang ada secara bersamaan maupun secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui juga, politik dinasti tidak saja diterapkan pada lembaga-lembaga pemerintahan pusat, namun politik dinasti juga diterapkan di pemerintahan daerah, seperti yang terjadi di Indonesia ketika berlangsungnya sebuah pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Dengan status negara yang berpenduduk muslim tertinggi ke empat didunia, maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melihat dan mengkaji keberadaan politik dinasti dalam pandangan islam mengingat politik dinasti tidak hanya menimbulkan pro dikalangan masyarakat secara luas tetapi juga menimbulkan kontra yang luar biasa dari masyarakat praktik politik dinasti ini sehingga hal tersebut dalam mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat terhadap figure atupun partai politik sebagai lembaga pengusung calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif dan calon Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini berlangsung di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴ Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research).

Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literaturliteratur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.⁵ Penulis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). Hal 60

⁵ *Ibid*,

perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan.⁶

Politik Dinasti di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina. Dinasti politik tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis-liberal. Tetapi pada hakikatnya dinasti politik juga tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan juga masyarakat monarki, dimana pada system monarki sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut.⁷

Dinasti politik yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka dinasti politik dapat berarti negatif. Istilah lain yang sepadan dengan pengertian dinasti politik adalah tren politik kekerabatan. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan atau memberi sebagian kekuasaan yang sudah dimiliki kepada

⁶ <http://bawaslubabelprov.go.id/index.php/artiker1/item/1631-> kekuasaan-dinasti-politik. Diakses pada tanggal 30 Maret 2021

⁷ *Ibid*,

orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Itulah pengertian netral dari dinasti politik.⁸

Terdapat pula pengertian positif dan negatif tentang dinasti politik. negatif dan positif tersebut bergantung pada proses dan hasil (*outcomes*) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan dinasti politik bersangkutan. Kalau proses pemilihannya fair dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka dinasti politik dapat berarti positif. Akan tetapi, bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Selain itu, positif dan negatif arti dinasti politik juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan penegakan hukum, dan pelebagaan politik bersangkutan. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turuntemurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan.⁹

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.

Dinasti Politik merupakan eksekusi negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggaran kekuasaan famili. Hal itulah yang kemudian memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman dinasti dalam praktek

⁸ Maruarar Siahaan. Cetakan kedua (2010) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho121209/menggagas-putusan-sela-dalam-sengketa-pilkada> diakses pada hari senin 29 Maret 2021. Pukul 19.01 WIB

pemerintahan local Dalam prakteknya sendiri aktualisasi dinasti politik dilakukan dengan beberapa sudut pandang yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik.¹⁰

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit Aktifis.

Pemahaman lain, dinasti politik sebagai bentuk politik keluarga (*political clan*) digunakan Kreuzer (2005) dan Cesar (2013). Dinasti politik muncul sebagai eksekusi dari warisan feodalisme yang masih menancap kuat di masyarakat. Feodalisme yang dimaksudkan bukan hanya penguasaan sumber daya ekonomi saja, tetapi juga terbentuknya jejaring loyalitas dalam masyarakat dengan melibatkan para tokoh informal. Seperti yang terdapat dalam kasus Filipina Selatan, dinasti politik muncul karena sistem institusionalisasi politik maupun penegakan hukum yang lemah karena kooptasi kekuatan klan politik. Bahkan, dinasti politik di sana sudah berkembang layaknya monarki politik dengan memilikimilisi bersenjata sendiri yang digunakan untuk mengintimidasi warga.

Namun kemudian bagaimana kita menempatkan dinasti politik sebagai bagian dari proses *input* dalam transisi demokrasi yang tidak sempurna. Adapun yang dimaksudkan dengan *input* dalam konteks ini adalah bagaimana sumber-sumber kekuasaan dinasti politik tersebut dibangun melalui kekuatan keluarga sehingga dapat berkembang menjadi kartel politik yang besar. Dalam hal ini, terdapat tiga karakteristik mendasar dalam menganalisis dinasti politik. *Pertama*, fungsi partai politik yang melemah di aras lokal karena terkooptasi oleh para elit daerah. Pada akhirnya timbul sikap pragmatisme dari partai politik dengan cenderung mengangkat elit dan keluarganya menjadi pejabat publik daerah. *Kedua*, neo-feodalisme yang menguat di daerah, yakni revitalisasi kekuatan tradisional dalam arena politik modern yang berbasis tribalisme, regionalisme, premanisme, dan lain sebagainya. *Ketiga*, biaya politik yang mahal dalam

¹⁰ Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 23

setiap Pemilu cenderung mereduksi partisipasi politik aktif dari masyarakat. Demokrasi lokal yang esensinya menjembatani partisipasi politik aktif maupun pasif masyarakat justru terjebak dalam logika demokrasi yang mahal baik dalam proses pengajuan kandidat hingga pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Sehingga dengan demikian keberadaan politik dinasti di Indonesia menjadi sesuatu legal secara hukum meski secara jelas dan detail tidak dijelaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam undang-undang pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Politik Dinasti di Beberapa Negara di Dunia

Dalam perkembangan politik dunia tak terkecuali di Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah perjalanan suatu Negara tersebut baik dari para pendiri bangsa atau Negara tersebut ataupun dari para pemimpin dan bagaimana kepemimpinan tersebut ia jalankan. Dalam pemilihan pemimpin tidak jarang yang terpilih dari kalangan karabat atau keluarga dekat dari pemimpin sebelumnya atau dari keluarga yang sedang berkuasa dalam suatu Negara atau dalam suatu daerah. Di Indonesia pun demikian keberadaan politik dinasti dianggap menjadi jalan mundur dari demokrasi Indonesia karena menutup ruang gerak dari salah satu pasangan atau calon untuk terpilih. Berbagai upaya dilakukan dalam mencegah hal tersebut khususnya adanya persyaratan yang melarang calon punya hubungan kekerabatan dengan penguasa. Namun upaya tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian perlu dipahami bersama bahwa keberadaan politik dinasti tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan banyak terjadi di beberapa Negara di belahan dunia yang juga terjadinya adanya praktik kekeluargaan dalam melanggengkan kekuasaannya. Dalam pembahasan dibawah ini membahas tentang beberapa Negara di dunia yang terjadi adanya praktik politik dinasti yang akan penulis bahas berikut juga dengan sejarah terpilihnya. Dari beberapa Negara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Dinasti Kennedy, Amerika Serikat.** Dinasti paling terkenal adalah Kennedy. Awalnya bukan John yang maju ke dunia politik. Kennedy senior yang kaya raya Joseph Kennedy -sang ayah dan ibu mereka Rose Fitzgerald, putri wali kota Boston mempunyai cita-cita anak-anak mereka jadi pemimpin. Setelah

berkarier sebagai komisioner Security and Exchange Commission, Joseph Kennedy menjadi Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Inggris. John Kennedy ikut andil sebagai sekretaris ayahnya. Rencananya mereka ingin menjagokan anak tertua mereka, Joe Kennedy, untuk maju ke Kongres dan akhirnya jadi presiden namun gagal. Oleh karena itu, John-lah yang maju memenuhi ambisi orang tuanya. Dan berhasil. John F. Kennedy menjadi presiden termuda dalam sejarah AS pada usia 35 tahun. Saat menjadi presiden, John memberikan kursi Jaksa Agung kepada Robert Kennedy dan Senat Massachusetts untuk adik termuda mereka, Edward.

2. **Dinasti Bush** adalah paling sukses sebagai dinasti politik Abad ke-20. Tahun 1952, Prescott Bush terpilih sebagai senator dari Connecticut, dan anaknya, George HW Bush pindah ke Texas dan mengikuti jejak sang ayah memenangkan kursi di US House of Representative. George kemudian menjadi wakil presiden mendampingi Ronald Reagan (1981-1989) lalu ia "menyingkirkan" Reagan dan menjadi presiden ke-41 (1989-1993). Tapi sayangnya, ia dikalahkan seorang Demokrat, Bill Clinton pada 1992. Meskipun sang ayah kalah di Washington, Bush Junior dan Jeb meliris karier bagus sebagai gubernur Texas dan Florida. Tahun 2000, Bush Junior memperkuat dinasti mereka untuk kembali memimpin AS hingga 2008-- dua periode.
3. **Nehru-Gandhi (India)** Setelah India merdeka, pemerintahan pusat Negeri Gangga dikuasi oleh keluarga Nehru-Gandhi. Jawaharlal Nehru, adalah perdana menteri pertama India (1947-1964). Ia adalah anak dari Motilal Nehru pejuang kemerdekaan India. Jawaharlal adalah ayah dari Indira Gandhi, yang mendapat nama Gandhi dari suaminya dan tak ada kaitannya dengan Mahatma Gandhi. Perempuan itu juga menjadi perdana menteri, bahkan selama 4 periode. Indira tewas ditembak pada 1984. Kepemimpinannya diambil alih oleh Rajiv Gandhi, putranya, yang juga terbunuh di 1991. Keluarga Nehru-Gandhi sempat absen selama enam tahun di Partai Kongres. Namun, setelah menang pemilu 2004, Kongres dipimpin oleh Sonia Gandhi, janda Rajiv. Tahun 2004, Sonia menolak dicalonkan sebagai perdana menteri dan

menominasikan Manmohan Singh. Generasi "terakhir" Nehru Gandhi, Rahul Gandhi (anak dari Rajiv dan Sonia) dikalahkan oleh Narendra Modi.

4. **Dinasti Bhutto (Pakistan)** Kematian tragis Benazir Bhutto membuat dinasti ini absen dalam kepemimpinan Pakistan. Benazir Bhutto adalah anak dari Zulfiqar Ali Bhutto. Zulfiqar menjadi presiden dan perdana menteri, namun kepemimpinannya berakhir dengan kudeta. Ia dihukum gantung oleh Jenderal Zia Ul Haq yang membuat keluarga Bhutto termasuk Benazir mengasingkan diri. Sesaat sebelum Pemilu 1988, Benazir kembali ke Pakistan. Pada 1988, pemilu digelar kembali di Pakistan setelah kematian Zia karena kecelakaan pesawat terbang. Benazir menang telak dan memimpin negara itu. Namun kepemimpinannya harus berakhir saat isu korupsi menerpa dirinya. Perempuan kelahiran 1953 harus "diasingkan lagi" dan suaminya masuk penjara. Tahun 2006, setelah 11 tahun berada di pengasingan, Benazir kembali ke Pakistan dan mencoba peruntungan di dunia politik. Malangnya, ia terbunuh dalam ledakan bom. Satu-satunya anak Benazir, Bilawal Bhutto Zardari, tahun lalu mencoba peruntungan mengembalikan dinasti Bhutto ke pemerintahan Pakistan namun gagal.
5. **Dinasti Kim (Korea Utara)** memimpin Korea Utara sejak negara itu didirikan. Adalah Kim Il-Sung, yang disebut sebagai 'bapak negara' pendiri Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) pada 1948. Kim Il-Sung muda adalah seorang gerilyawan melawan Jepang pada 1920-an dan sempat tinggal di Rusia. Tahun 1945 Kim kembali ke Korea. Kim Il-Sung fokus pada pembangunan militer dan industrialisasi di Korut. Namun, pihak Utara menemui kesulitan saat Uni Soviet runtuh dan semakin menutup diri dari dunia internasional. Sepeninggal Kim Il-Sung, tampuk kepemimpinan Korut diberikan kepada anaknya Kim Jong-il. Saat kepemimpinan Kim Jong-il, Korea Utara menjadi negara yang ditakuti. Rezim dinasti Kim berlanjut hingga sekarang. Negara paling terkucil dan tertutup di dunia kini dipimpin oleh Kim Jong-un, anak dari Kim Jong-il, cucu Kim Il-sung.
6. **Dinasti Bandranaike (Sri Lanka)** Sri Lanka memulai tradisi dinasti politik pada 1960 ketika Sirimavo Bandranaike yang juga janda tokoh Sri Lanka, Salomo Andranaike menjadi perdana menteri. Di kemudian hari putri

Sirimavo, Chandrika Bandranaike Kumaratunga menjadi presiden sejak 1994 (12 November 1994-19 November 2005). Sementara anak lelakinya, Anura Bandranaike menjadi pimpinan kunci partai oposisi United National Party. Meskipun pemerintahanya berakhir sejak pemilu 1977, Sirimavo telah melahirkan sebuah dinasti politik.

7. **Abdul Razak (Malaysia)** Perdana Menteri Malaysia ke-6 Najib Tun Abdul Razak lahir 1953 di Pahang dan mempunyai garis keturunan yang pernah memimpin Malaysia. Najib merupakan anak sulung dari pasangan Abdul Razak Hussein dan Rahah Mohamad Noah. Kakek Najib adalah Perdana Menteri Malaysia ke-2 yakni Tun Abdul Razak yang memerintah dari 1970-1974. Bukan itu saja, Najib juga keponakan Perdana Menteri ke-3 Malaysia Hussein Onn, yang meneruskan Abdul Razak sampai 1978.
8. **Dinasti Aquino (Filipina)** Keluarga Aquino di Filipina telah berpolitik sejak Servillano Aquino terpilih menjadi anggota Kongres pada 1898. Pembunuhan senator Benigno Aquino, Jr., memicu People Power pada 1986 yang menggulingkan diktator Ferdinand Marcos. Corazon Aquino mengambil peran penting sebagai tokoh oposisi setelah kematian suaminya dan terpilih sebagai presiden di tahun yang sama. Pada 2010 Benigno Aquino III, putra Corazon terpilih sebagai Presiden Filipina ke-15. Benigno Aquino III membawa warisan popularitas sebagai anak Cory Aquino.
9. **Dinasti Lee (Singapura)** Sebagai negara, Singapura baru merdeka sejak 31 Agustus 1963. Sejak itu Singapura baru melahirkan tiga orang perdana menteri. Dinasti Lee muncul dalam politik Singapura ketika Lee tua ikut mendirikan Partai Aksi Rakyat (PAP) pada 1954 dan ia didapuk menjadi sekretaris jenderal. Pada 1959, ia terpilih sebagai perdana menteri dan menjadi penguasa tunggal Singapura ketika negara ini bercerai dari Federasi Malaysia, 9 Agustus 1965. Lee tua memimpin dengan tangan besi. Dan hasilnya Singapura menggiurkan bagi investor asing. Majunya ekonomi Singapura membuat Lee terus bercokol di kantor perdana menteri selama delapan kali pemilihan umum. PAP sebagai mesin politiknya tak pernah absen menjadi mayoritas di parlemen.

Dari beberapa bahasan di atas, jika dikaji lebih dalam beberapa Negara tersebut terdapat Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Demokrasi dalam menentukan pemimpin melalui mekanisme pelaksanaan pemilihan umum artinya pemimpin ditentukan oleh suara mayoritas masyarakat atau rakyatnya bukan berdasarkan garis keturunannya sebagaimana telah dijelaskan dalam bab di atas. Berbeda dengan Negara monarki dalam menentukan pemimpin memang sebuah keniscayaan pemimpin itu berasal dari keluarga penguasa dan hal ini tidak ada masalah baik dilihat dari kaca mata demokrasi maupun dari sisi sistem penyelenggaraan negaranya. Yang menjadi masalah adalah ketika Negara dengan sistem demokrasi akan tetapi pemimpin yang lahir seolah-olah dengan cara monarki sebagaimana telah diurai di atas tak terkecuali Amerika Serikat yang mana para pendiri Negara menghendaki adanya suara rakyat yang menentukan pemimpinnya dengan cara yang demokratis bukan dengan memaksakan garis keturunan terpilih dengan cara berkedok demokrasi.

KESIMPULAN

Keberadaan dan perkembangan Politik Dinasti sebenarnya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia bahwa sejak sebelum Indonesia menjadi Negara yang merdeka mengingat praktik politik kekerabatan sudah dipraktikkan oleh bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Namun saat itu dikenal dengan istilah politik atau kekuasaan kekeluargaan hingga saat ini penyebutan tersebut lumrah dikenal dengan istilah politik dinasti yang saat ini banyak terjadi dalam praktek pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan atau memberi sebagian kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.

Dalam perkembangannya. Praktik politik dinasti tidak hanya terjadi pada Negara Indonesia. Akan tetapi praktik serupa juga banyak terjadi pada beberapa Negara di dunia, misal, Amerika Serikat, India, Filipina, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Korea dan Singapura. Beberapa negara di atas adalah negara demokrasi bukan negara monarki. Demokrasi menghendaki pemimpin lahir dari suara rakyat bukan dari kalangan kerabat. Namun yang terjadi saat ini adalah monarki dibungkus dengan bingkai demokrasi. Tak

terkecuali di Indonesia. Sehingga pada prinsipnya Politik Dinasti kembali pada masyarakat selaku pemegang kedaulatan suara rakyat.

DAFTAR REFERENSI

A.Kosasih Djahiri. 1971. *Ilmu Politik*. Permaco. Bandung. hlm. 49 dalam tesis Icha Cahyaning Fitri, *Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif*. Fakultas hukum Universitas Jember.

Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigm Kedaulatan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implimentasi Pada Lembaga Negara*, Setara Press, Malang. 2015

C.S.T Kansil dan Christian S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dann Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Rineka Cipta. Jakarta.

Budhy Prianto. 2016. Partai politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemeliharaan Kepala Daerah dan Desentralisasi. Publisia, Jurnal Administrasi public. V.1 No 2

Pahmi. 2010. *Politik Pecitraan*, Jakarta; Gaung Persada Press,